

Keterkaitan Antara Pengaruh Struktur Sosial dan Ekonomi Terhadap Kebijakan Redistribusi Pendapatan Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau

Gery Aphira^{1*}, Wahjoe Pangestoeti², Andhini Syahrani³, Maharani⁴

¹⁻⁴Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik, Universitas Maritime Raja Ali Haji

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 30, 2024

Revised May 09, 2024

Accepted May 10 2024

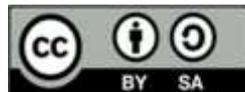
Available online May 22, 2024

Keywords

struktur sosial, struktur ekonomi, kebijakan redistribusi pendapatan

Keywords:

social structure, economic structure, income redistribution policy



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji mengenai bagaimana hubungan antara struktur sosial dan struktur ekonomi terhadap implementasi kebijakan redistribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat korelasi atau keterkaitan antara struktur sosial dan struktur ekonomi terhadap kebijakan redistribusi pendapatan. Struktur sosial dan struktur ekonomi mampu merepresentasikan kesejahteraan masyarakat dan memvisualisasikan kesenjangan pendapatan. Dengan demikian, diharapkan struktur sosial dan struktur ekonomi dapat dijadikan gambaran terkait penargetan dari kebijakan redistribusi pendapatan supaya tidak salah sasaran.

ABSTRACT

This article examines the relationship between social structure and economic structure on the implementation of income redistribution policies in the Riau Islands Province. The research method used is a descriptive analysis research method with a literature study approach. Based on the research results, it is known that there is a correlation or link between social structure and economic structure on income

redistribution policies. Social structure and economic structure are able to represent community welfare and visualize income gaps. In this way, it is hoped that the social structure and economic structure can be used as an illustration regarding the targeting of income redistribution policies so that they are not mistargeted.

PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbentuk kepulauan. Karena berbentuk kepulauan, maka wilayah di Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh wilayah perairan, yang mana persentase daratan hanya mencapai 4%, sedangkan persentase wilayah perairan mencapai 96%. Pada tahun 2020, jumlah penduduk tertinggi berada di Kota Batam dengan total penduduk sebanyak 1.196.396 jiwa. Adapun jumlah penduduk terendah berada di kepulauan Anambas dengan total penduduk sebanyak 47.402 jiwa (Akbar et al., 2022). Tak hanya itu, dari 2408 pulau yang tersebar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, hanya 385 pulau yang dihuni, dan sisanya merupakan pulau yang tidak berpenghuni. Tidak meratanya jumlah penduduk ini disebabkan oleh faktor geografi dari Provinsi Kepulauan Riau yang didominasi oleh dataran tinggi, sehingga mayoritas penduduk lebih memilih tinggal di daerah dengan dataran yang lebih landai, seperti Kota Batam. Kondisi geografis yang cenderung didominasi oleh dataran tinggi dan wilayah perairan ini menimbulkan terjadinya ketidakmerataan redistribusi pendapatan.

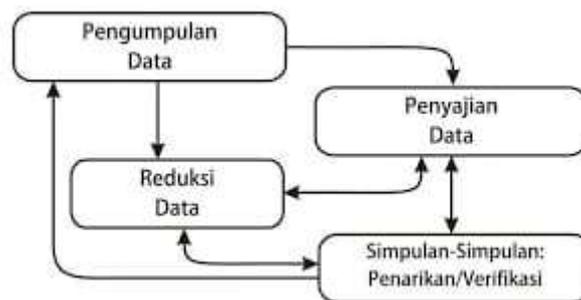
Banyaknya pulau yang tidak berpenghuni, dan wilayah laut yang luas membuat sumber daya alam di Provinsi Kepulauan Riau sangat melimpah. Namun, pada kenyataannya, masih banyak terdapat beberapa tempat di Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi wilayah terbelakang dan juga miskin. Ketimpangan jumlah penduduk antar wilayah di Provinsi Kepulauan Riau ini menimbulkan timbulnya problematika terkait struktur sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Penulis berasumsi bahwasanya struktur sosial dan ekonomi masyarakat memiliki keterkaitan dengan redistribusi pendapatan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode yang dipilih di dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang penyampaian datanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dengan kata lain, metode penelitian kualitatif deskriptif

*Corresponding author
email: geryaphira@gmail.com

merupakan berusaha merepresentasikan atau memvisualisasikan fakta dan data yang ada dengan kalimat penjelas yang mudah dipahami oleh pembaca. Adapun data yang diambil di dalam penelitian ini bersumber dari kajian literatur yang penulis lakukan. Tak hanya itu, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan diskusi terfokus. Diskusi terfokus ini bertujuan untuk melakukan telaah terhadap data dan fakta yang ditemukan, dan apakah bersesuaian dengan kajian yang dibahas atau tidak. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif. Analisis data dimulai dengan pengumpulan data, kemudian data disajikan. Beberapa data dilakukan proses reduksi untuk memilah data yang krusial sehingga kajian bahasan tidak muluk-muluk dan bersesuaian dengan topik. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan terhadap data yang sudah disajikan dan direduksi. Berikut adalah diagram analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini.



Gambar 1. Diagram analisis data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan antara Struktur Sosial dengan Kebijakan Redistribusi Pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau

Redistribusi pendapatan merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan distribusi pendapatan dari masyarakat pada suatu wilayah dari masyarakat yang kaya ke masyarakat yang kurang mampu. Umumnya, redistribusi pendapatan diambilkan dari pajak. Tujuan dilakukannya redistribusi pendapatan adalah untuk mengatasi adanya kesenjangan sosial di masyarakat. Tak hanya itu, redistribusi pendapatan juga memiliki implikasi yang krusial dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang ada di sebuah wilayah yang bersangkutan (Hidayat & Karimi, 2020). Dengan demikian, melalui redistribusi pendapatan ini, maka diharapkan terjadi pemberdayaan terhadap masyarakat kelas menengah kebawah. Namun, redistribusi pendapatan ini seringkali mengalami kekeliruan terhadap sasaran yang dituju. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah klasifikasi atau pengelompokan terhadap masyarakat yang bersangkutan.

Di dalam kehidupan sosial, secara otomatis akan terbentuk sebuah struktur sosial. Struktur sosial dapat didefinisikan sebagai sebuah tatanan atau klasifikasi yang ada di dalam masyarakat, yang mana hal ini membentuk sebuah kelompok-kelompok sosial. Dominasi wilayah perairan di Provinsi Kepulauan Riau, menyebabkan nelayan menjadi pekerjaan mayoritas masyarakatnya. Struktur sosial dalam masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau ditinjau dari mata pencahariannya, dibedakan atas kelas-kelas sebagai berikut:

a. Nelayan Pemilik Modal

Kelompok nelayan yang memiliki modal adalah kelompok nelayan yang memiliki fasilitas lengkap, seperti halnya kapal yang besar, alat penangkapan ikan yang lengkap, dan sebagainya. Nelayan pemilik modal umumnya mempekerjakan orang lain. Nelayan pemilik modal juga memiliki usaha yang lebih maju dan besar (Tanjung, 2023).

b. Pengepul Ikan

Pengepul ikan merupakan distributor yang umumnya menjual hasil tangkapan para nelayan kepada masyarakat atau konsumen. Pengepul Ikan memiliki menguasai kondisi pasar dan umumnya memiliki penghasilan yang menjanjikan (Tanjung, 2023).

c. Nelayan Konvensional

Nelayan konvensional merupakan nelayan yang biasanya bekerja kepada nelayan pemilik modal, Nelayan konvensional memiliki kemampuan dalam berlayar, namun biasanya tidak memiliki fasilitas dan target pasar yang besar (Tanjung, 2023).

d. Pembantu Nelayan

Pembantu nelayan umumnya dijuluki sebagai awak kapal yang memiliki tugas untuk membantu nelayan utama ketika pergi melaut. Sebagai pembantu, maka pendapatan yang dihasilkan oleh pembantu nelayan tentu memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan nelayan utama (Tanjung, 2023).

Berdasarkan struktur sosial yang direpresentasikan dalam kelas-kelas tersebut, tentu kebijakan redistribusi pendapatan akan dapat dilakukan dengan baik. Struktur sosial pada umumnya akan memvisualisasikan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang bersangkutan. Dengan adanya klasifikasi yang disebutkan di atas, maka ruang lingkup kebijakan distribusi pendapatan semakin dipersempit, dalam artian penentuan target dari redistribusi pendapatan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan lebih terorganisir dan tentunya lebih tepat sasaran. Meskipun demikian, terbentuknya klasifikasi-klasifikasi sosial dalam internal masyarakat tidak lantas digunakan untuk menumbuhkan kelas-kelas sosial di dalam masyarakat Provinsi Kepulauan Riau itu sendiri.

Dengan demikian, terdapat korelasi antara struktur sosial dengan kebijakan redistribusi pendapatan, yang mana semakin timpang struktur sosial yang ada, maka akan terjadi pula peningkatan implementasi kebijakan redistribusi pendapatan yang bersangkutan atau dengan kata lain realisasi kebijakan redistribusi pendapatan harus dilakukan sesegera mungkin (Rusdi et al., 2023). Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa struktur sosial secara implisit mampu dijadikan sebagai patokan terkait kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Adapun sebaliknya, apabila struktur sosial tidak menunjukkan ketimpangan yang terlalu tinggi, maka redistribusi pendapatan akan dapat diminimalisir dengan baik.

Keterkaitan antara Struktur Ekonomi dengan Kebijakan Redistribusi Pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau

Ketimpangan terkait pendapatan apabila tidak segera ditangani akan membahayakan sebuah wilayah administrasi secara berkelanjutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak wilayah yang tertinggal dan juga menjadi salah satu provinsi yang memiliki banyak masalah terkait dengan kemiskinan. Dengan demikian, hendaknya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai memperhatikan kekuatan dan kelemahan dari struktur ekonomi masyarakatnya. Dalam hal ini, struktur ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permasalahan makroekonomi dalam jangka waktu yang panjang. Di setiap periode, tentu struktur ekonomi masyarakat akan terus berkembang secara dinamis (Putri & Monika, 2022).

Para ahli ekonomi percaya bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi akan dapat menyelesaikan segala bentuk ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Namun, perlu diketahui bahwasanya pertumbuhan ekonomi yang tidak setara, justru akan semakin memperburuk kondisi ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat yang ada (Putri & Monika, 2022). Berdasarkan klasifikasi struktur sosial pada mata pencaharian nelayan di Provinsi Kepulauan Riau di atas, dapat diketahui bahwasanya nelayan konvensional dan pembantu nelayan menempati jenis pekerjaan yang paling memiliki resiko pendapatan rendah. Di dalam penerapan kebijakan redistribusi pendapatan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, hendaknya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mampu meninjau kondisi perekonomian masyarakat secara spesifik. Dengan demikian, sasaran dari realisasi kebijakan redistribusi pendapatan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak akan menyimpang jauh.

Pada faktanya, perubahan struktural di masyarakat akan terus terjadi, khususnya struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi terjadi akibat dampak yang dihasilkan dari meluasnya pasar global dan perdagangan internasional (Huda, 2022). Seperti halnya struktur sosial, struktur ekonomi juga memiliki implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya pada masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi kajian dalam penelitian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk di Provinsi Kepulauan Riau adalah nelayan. Dengan demikian, sektor perikanan dan sumber daya laut menempati urutan pertama yang menunjang produk domestik bruto (PDB) Provinsi Kepulauan Riau. Di era perekonomian yang semakin maju, kemungkinan besar bergesernya sektor perekonomian penduduk Provinsi Kepulauan Riau juga akan terjadi. Bergesernya sektor perekonomian ini akan mempengaruhi struktur ekonomi internal Provinsi Kepulauan Riau yang bersangkutan.

Oleh karena itu, perubahan struktur ekonomi Provinsi Kepulauan Riau secara garis besar akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat itu sendiri. Ketimpangan pendapatan ini akan memicu terjadinya kesenjangan sosial. Setelah kondisi yang demikian, maka kebijakan redistribusi pendapatan harus diimplementasikan dengan segera untuk menstabilkan kondisi yang ada. Dengan demikian, terdapat sebuah korelasi antara struktur ekonomi terhadap realisasi kebijakan redistribusi pendapatan.

SIMPULAN

Struktur sosial dan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sama-sama memberikan representasi dan visualisasi terkait dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Tak hanya itu, struktur sosial dan ekonomi juga mampu menunjukkan ada atau tidaknya kesenjangan sosial pada tiap kelompok-kelompok masyarakat. Dengan diketahuinya kesenjangan sosial di masyarakat, maka implementasi kebijakan redistribusi pendapatan akan dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian, akan muncul skala prioritas terhadap kelompok-kelompok sosial masyarakat mana yang harus

didahulukan dalam penargetan kebijakan redistribusi pendapatan oleh pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau. Struktur sosial dan ekonomi juga dapat digunakan sebagai indikator pelaksanaan kebijakan redistribusi pendapatan, yang mana apabila kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sudah stabil, maka kebijakan redistribusi pendapatan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi antara struktur sosial dan ekonomi dengan implementasi kebijakan redistribusi pendapatan.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hendaknya mampu melakukan Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara konsisten untuk mengetahui struktur sosial dan ekonomi masyarakatnya.
2. Implementasi kebijakan redistribusi pendapatan harus dilakukan secara tepat sasaran dengan meninjau kondisi sebenarnya di lapangan, untuk menghindari adanya manipulasi dari oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab.

REFERENSI

- Akbar, D., Pratama, R. A., Yudhyo, Sianturi, R. L., & Triyana, N. (2022). Strategi Pengembangan Blue Economy Wilayah Perbatasan Indonesia : Tata Kelola Ekonomi Maritim Pesisir Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1).
- Hidayat, M., & Karimi, S. (2020). Inequality, Economic Growth, and Redistribution; Literature Review. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 10(1).
- Huda, S. N. (2022). Perubahan Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat Perdesaan. *Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 4(2).
- Putri, H. S., & Monika, A. K. (2022). Analisis Perubahan Struktural dan Pengaruhnya terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di jawab Barat Tahun 2011-2019. *Seminar Nasional Official Statistic*, 1(1).
- Rusdi, Rizabuana, Manurung, R., Badaruddin, & Sismudjito. (2023). Perubahan Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Alih Fungsi Lahan di Desa Transmigrasi Batang Pane II Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara. *Sibatik Journal*, 2(5).
- Tanjung, N. S. (2023). Struktur Sosial dalam Masyarakat Nelayan di Rempang Kepulauan Riau. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(11).